

## DIPLOMASI ISRAEL DALAM MENENTANG UPAYA PALESTINA MENJADI ANGGOTA PENUH PBB

Oleh:

Sari Hastuti

[Sarihastuti90@yahoo.com](mailto:Sarihastuti90@yahoo.com)

Harmiyati

[har3yati@yahoo.com](mailto:har3yati@yahoo.com)

Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Yogyakarta

### Abstract

*Palestinians submitted a proposal to become a full member of the United Nations in 2011 but did not receive enough support from the UN Security Council. Palestinians again proposed to increase membership status with the United Nations General Assembly in 2012. Israel saw the Palestinian as an attempt unilateral adverse political position Israel. This study aims to know the diplomacy Israel in opposing Palestinian efforts to become a full member of the United Nations through bilateral and multilateral diplomacy. The results showed that Israel bilateral diplomacy has failed. The results showed that Israel through bilateral diplomacy has failed. Multilateral diplomacy has also failed to prevent an increase in Palestinian UN membership status. On 29 November 2012, the UN General Assembly decided to increase the status of the Palestinian to non-member observer state in the United Nations. Palestinian was supported 138 countries, 41 countries abstained, and only 9 states that the Palestinians refused to increase membership status*

*Keyword : Diplomacy, Israel, Palestine Status*

### Pendahuluan

Perjalanan panjang menjadi negara merdeka sampai sekarang belum tercapai. Secara diplomatik, perjuangan Palestina mulai diakui internasional setelah Palestina diakui oleh PBB sebagai sebuah entitas di bawah organisasi yaitu Organisasi pembebasan Palestina atau *Palestine Liberation Organization* (PLO) yang dibentuk tahun 1964.

Palestina terus berusaha melalui langkah diplomatik, baik melalui Liga Arab, gerakan non blok, dan organisasi-organisasi internasional di bawah PBB. Pada saat yang sama, upaya perlawanan bersenjata terhadap Israel sering terjadi yang menunjukkan eksistensi Palestina secara militer di hadapan Israel dan dunia internasional.

Upaya Palestina sejak awal berdirinya Israel tahun 1950 terus mendapat tentangan terutama dari Israel sendiri dan Amerika Serikat sebagai negara pendukung Israel. Melalui upaya militer ataupun diplomatik, Israel terus menekan bangsa Palestina. Upaya diplomatik

sangat penting guna menggalang dukungan internasional terhadap kebijakan Israel tentang Palestina. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti tentang diplomasi Israel dalam menentang upaya Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Berdirinya negara Israel tahun 1948 di tanah Palestina telah menimbulkan konflik panjang yang tiada akhir hingga saat sekarang. Bangsa Palestina terus melakukan perlawanan. Pada saat yang sama, upaya mendamaikan Palestina dan Israel terus dilakukan meskipun tidak membawa hasil. Proses damai yang dilakukan Palestina dan Negara-Negara Arab sejak kesepakatan Oslo 1993 hingga perundingan di Camp David, AS, tahun 2000 (Perundingan Camp David II) tidak membuahkan perdamaian bagi kedua belah pihak.

Perjanjian Oslo I pada 13 September 1993 antara PM Israel Yitzhak Rabin dan Arafat mewakili Palestina. Hasil kesepakatan Oslo ini tidak memuaskan Palestina, namun hal positif yang didapat Palestina adalah adanya bendera dan lagu kebangsaan yang diakui oleh Israel. Sebagai

pemerintahan otonom, Palestina juga berhak mengadakan pemilihan umum guna membentuk pemerintahan Palestina.<sup>1</sup>

Konflik terus berlanjut dan upaya damai pun terus dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Palestina ingin memperoleh dukungan dunia menghadapi agresi yang dilakukan oleh Israel di Palestina dan ingin memperoleh pengakuan atas batas secara yuridis sesuai batas 4 Juli 1967 dengan ibukota di Yerusalem Timur. Palestina akan mengajukan permohonan sebagai anggota penuh PBB pada Jumat 23 September 2011. Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan tersebut, Sekjen akan mengirimkan permohonan itu ke DK PBB. Permohonan hanya bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB serta tidak mendapat veto (penolakan) dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB.<sup>2</sup>

Berbagai upaya negosiasi dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk menghambat Palestina menjadi anggota PBB. Bahkan AS yang merupakan salah satu sekutu Israel berjanji akan menggunakan hak vetonya apabila Palestina bersikeras ingin menjadi anggota PBB.<sup>3</sup> Israel aktif melakukan diplomasi guna mencegah peningkatan status Palestina di PBB. Diplomasi merupakan manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang diselenggarakan dan diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis dan seni para diplomat. Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>4</sup>

Diplomasi dapat dilakukan melalui hubungan *reciprocity* yaitu hubungan timbal balik dua pihak/ negara, atau biasa disebut dengan hubungan bilateral. Diplomasi juga dapat dilakukan melalui hubungan multilateral, yaitu ketika diplomasi yang dilakukan dalam forum-forum internasional yang diadakan oleh organisasi-organisasi internasional.<sup>5</sup>

Menurut teori *Multi-track Diplomacy*, langkah strategis dalam diplomasi yaitu dengan mengikutsertakan *stakeholder* diplomasi.<sup>6</sup> Diplomasi tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor tunggal, tetapi juga dapat melibatkan elemen masyarakat yang lain. Diamond dan MacDonald menyebut ada sembilan *track* (pihak) yang bisa dilibatkan dalam diplomasi. *Track 1: Government,*

*or Peacemaking through Diplomacy; Track 2: Nongovernment/Professional, or Peacemaking through Conflict Resolution; Track 3: Business, or Peacemaking through Commerce; Track 4: Private Citizen, or Peacemaking through Personal Involvement; Track 5: Research, Training, and Education, or peacemaking through Learning; Track 6: Activism, or Peacemaking through Advocacy; Track 7: Religion, or Peacemaking through Faith in action; Track 8: Funding, or Peacemaking through Providing Resources; dan Track 9: Communications and the Media, or Peacemaking through Information.* Diplomasi yang dijalankan Israel dalam menentang peningkatan status Palestina di PBB adalah melalui track 1 yaitu diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah atau juru damai melalui jalur diplomasi yang resmi. Ada dua bentuk diplomasi yang dijalankan pemerintah yaitu diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral adalah diplomasi yang dilakukan oleh dua Negara saja. Dan diplomasi multilateral adalah diplomasi yang dilakukan oleh lebih banyak Negara.

Diplomasi bilateral dilakukan dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Uni Eropa, negara-negara anggota DK PBB dan juga diplomasi dengan Palestina sendiri. Diplomasi multilateral dilakukan dengan bernegosiasi di lembaga-lembaga internasional. Diplomasi multilateral Israel dengan Uni Eropa di antaranya ditunjukkan dengan melobi Negara-negara penting, setelah Prancis dan Inggris yang juga menjadi anggota tetap DK PBB, Israel juga melakukan diplomasi kepada Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol dan Italia.

Proses panjang peningkatan status Palestina di PBB.

1. Pada tahun 1974, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) diberikan status pengamat oleh resolusi 3237 (XXIX). Resolusi, antara lain, mengundang PLO untuk berpartisipasi dalam sesi dan pekerjaan Majelis Umum dalam kapasitas pengamat dan mengundang PLO untuk berpartisipasi dalam sesi dan pekerjaan semua konferensi internasional yang diselenggarakan di bawah naungan Majelis Umum dalam kapasitas pengamat.
2. Pada bulan Juli 1977, ECOSOC mengadopsi rekomendasi dalam resolusi 2.089 dan PLO menjadi anggota penuh ESCWA.

3. Dalam resolusi 43/160A dari 9 Desember 1988, Majelis memutuskan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina berhak menjalin komunikasi dan telah ditempatkan dan disebarakan sebagai dokumen resmi PBB.
4. Pada tanggal 9 Februari 1989, pada pertemuan yang ke 2.845, Dewan Keamanan mempertimbangkan permintaan yang dibuat langsung oleh Misi Pemantau Palestina agar Observer Palestina dapat berpartisipasi dalam perdebatan di Dewan Keamanan PBB.
5. Pada tanggal 7 Juli 1998, resolusi Majelis Umum memutuskan bahwa Palestina dapat berpartisipasi dalam pekerjaan PBB. Resolusi diberikan kepada hak-hak Palestina tambahan dan hak partisipasi yang sebelumnya eksklusif untuk negara Anggota juga diberikan untuk Palestina.<sup>7</sup>
6. Pada tahun 2012, Palestina diberi status sebagai negarapengamat non anggota.

Palestina melakukan upaya diplomatik dengan menjalin komunikasi intensif dan lobiying ke berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional seperti Liga Arab, organisasi gerakan non blok, organisasi Konferensi Islam, PBB, Uni Eropa, serta negara-negara lain di dunia.

Diplomasi melalui gerakan Non Blok dilakukan Abbas dengan menghubungi negara-negara kunci dalam Gerakan Non Blok seperti Indonesia dan Iran. Presiden Mahmoud Abbas mendapat tempat untuk berbicara dalam forum KTT gerakan Non Blok di Teheran Iran pada 29 Agustus 2012 untuk menjelaskan kepada forum gerakan Non Blok tentang upaya Palestina menjadi anggota PBB.<sup>8</sup> Banyak negara-negara kunci di dalam Gerakan Non Blok, seperti Indonesia aktif menggalang dukungan bagi masuknya Palestina sebagai negara pengamat di PBB. Kontribusi GNB mencapai perdamaian dan keadilan di palestina dilakukan melalui langkah-langkah konkret Deklarasi Solidaritas Khusus untuk Palestina (Special Solidarity Declaration for Palestine).<sup>9</sup>

Diplomasi Palestina di dalam OKI bukan hal baru karena sejak lama masalah Palestina menjadi isu yang selalu dibahas dalam OKI. Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu menyatakan, dukungan kepada Palestina merupakan salah

satu prioritas kebijakan di organisasi yang dipimpinnya. Ihsanoglu menyebut dukungan negara anggota OKI kepada Palestina itu berhasil memberikan dampak besar terhadap posisi Palestina di dunia internasional.<sup>10</sup>

Sebelum mengajukan diri sebagai anggota tetap PBB, Palestina telah terlebih dulu mendaftar ke berbagai badan internasional di bawah PBB pada tanggal 23 September 2011. Unesco adalah badan PBB pertama yang mengangkat Palestina sebagai anggota penuh melalui pemungutan suara pada 31 Oktober 2011. Sebanyak 107 anggota mendukung Palestina, 14 menolak dan 52 abstain. Selain keuntungan diplomatik, jika menjadi anggota Unesco, pemerintah Palestina dapat mendaftarkan monumen, atau daerah bersejarah di negara mereka untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia.<sup>11</sup>

Berdasarkan aturan PBB, untuk menetapkan status keanggotaan penuh bagi sebuah negara membutuhkan rekomendasi Dewan Keamanan sebelum mendapat persetujuan dua pertiga dari 193 negara anggota PBB. Sementara itu, status negara pengamat cukup mendapat persetujuan Sidang Umum PBB dimana hak veto negara anggota tetap Dewan Keamanan tidak berlaku. Status pengamat juga bisa member akses bagi Palestina ke berbagai organisasi dunia semacam Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, atau Pengadilan Kriminal Internasional, ICC.<sup>12</sup>

Upaya Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB jelas bertentangan dan mengancam kedaulatan Israel. Sebaliknya, bagi Palestina, upaya menjadi anggota tetap PBB adalah bagian dari upayanya mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Dalam proposal pengajuan menjadi anggota tetap PBB, Palestina mengklaim wilayahnya adalah sesuai dengan batas wilayah yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967.

Berdasarkan batas wilayah Palestina tahun 1967 berarti wilayah Palestina terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tepi Barat terdiri dari Hebron, Jericho, Jenin, Nablus, Tuqam dan Qalqiyah.

### Respon Israel

Israel memberikan respon keras atas klaim Palestina mengenai wilayah Palestina yaitu dengan batas wilayah tahun 1967. Publik di Israel memandang negatif penyebutan batas wilayah

tersebut karena secara demografis sudah sangat berbeda. Pada wilayah-wilayah yang diklaim Palestina tersebut telah berdiri pemukiman Yahudi.

Israel berkepentingan menentang klaim batas wilayah tersebut karena apabila batas wilayah tersebut diterapkan, maka kota-kota Yerusalem, Yudea dan Samaria akan terlepas dari Israel. Secara demografi, jumlah penduduk Israel yang bermukim di Tepi Barat terus bertambah banyak. Apabila batas wilayah mengikuti tahun 1967, maka akan banyak penduduk Israel yang harus kehilangan tempat tinggal. Hal ini jelas ditolak oleh Israel.

Di hadapan ribuan penganut Yahudi dan anggota parlemen AS pro-Israel yang tergabung dalam *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC), Senin, 23 Mei 2011, pada pidatonya tersebut, Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak akan kembali ke Peta Perbatasan 1967 yang mengatur wilayah sebelum perang dengan Palestina. Pada peta tersebut, wilayah-wilayah yang telah dicaplok Israel merupakan wilayah Palestina, diantaranya adalah Tepi Barat dan Jalur Gaza.<sup>13</sup>

### Upaya Israel melalui Diplomasi Bilateral

Israel aktif mengambil langkah-langkah diplomasi bilateral dengan negara-negara yang selama ini mendukung keberadaan Israel, yaitu negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat. Diplomasi yang dilakukan menggunakan berbagai jalur yang memungkinkan memperkuat posisi Israel di mata Internasional, khususnya dalam mendukung sikap Israel menentang Palestina menjadi anggota tetap PBB.

Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, terus melanjutkan upayanya mencegah pengakuan negara Palestina di Majelis Umum PBB pada sidang bulan September 2012. Lieberman berencana berkunjung ke Kroasia, Albania, dan Austria. Dalam agenda kerjanya, Lieberman bertemu dan berunding dengan para pejabat negara tujuan. Lieberman berupaya meyakinkan pejabat setempat untuk menentang pengakuan negara Palestina. Sebelumnya, Lieberman menginstruksikan Dirjen Kementerian Luar Negeri Israel untuk menyusun daftar negara-negara yang belum mengambil keputusan untuk menolak mengakui

negara Palestina dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membujuk negara tersebut menentang rencana Palestina di Majelis Umum PBB. Beberapa hari sebelumnya, Wakil Menlu Israel, Danny Ayalon, memperkirakan bahwa 118 dari 192 negara anggota PBB akan mengakui Palestina.<sup>14</sup>

Diplomasi Israel kepada Amerika Serikat tidak hanya menghasilkan dukungan untuk menentang Palestina menjadi anggota PBB, tetapi juga menghasilkan kerjasama aktif Amerika Serikat untuk ikut mengkampanyekan penolakan peningkatan status Palestina di PBB. Peran aktif Amerika Serikat di antaranya yaitu:

1. Pada 17 September 2011, Amerika Serikat mengancam menghentikan bantuan keuangan kepada Palestina jika Palestina melanjutkan upaya menjadi anggota PBB,<sup>15</sup> dan mengancam menggunakan hak vetonya kepada Palestina.
2. Rabu 28 November 2012 Amerika Serikat menegaskan sikapnya dan menyampaikan kepada semua negara sekutunya untuk menolak peningkatan status Palestina di PBB.

### Diplomasi dengan Negara-negara Anggota DK PBB

Israel hanya mendekati DK PBB yang pro Barat yaitu Prancis, Inggris dan Amerika Serikat. Diplomasi dengan Prancis dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan bahwa solusi bagi Palestina adalah melalui negosiasi, bukan mencari dukungan dari negara-negara lain di forum majelis umum PBB.

Prancis, melalui Hollande memberikan respon yang tampak mendukung Israel. Prancis telah menekankan sekali lagi bahwa Palestina harus kembali ke meja perundingan. Di samping sebagai negara utama Uni Eropa, Prancis juga menjadi salah satu negara anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto. Selama ini, Prancis terlibat aktif dalam kwartet yaitu AS, Uni Eropa, PBB dan Rusia dalam proses damai Israel-Palestina.<sup>16</sup>

Diplomasi Israel dengan Prancis menghasilkan dukungan untuk melanjutkan negosiasi damai antara Palestina dan Israel, tetapi juga mendukung peningkatan status Palestina di PBB. Namun demikian, dalam sidang majelis umum PBB, Prancis memilih mendukung

Palestina menjadi anggota tidak tetap PBB.

Diplomasi Israel yang ditujukan kepada Inggris dapat dikatakan telah gagal. Hal ini dibuktikan dengan sikap Inggris memilih tidak menggunakan hak suaranya atau abstain pada saat pemungutan suara penentuan status Palestina di PBB pada tanggal 29 November 2012. Hal ini berarti tidak ada upaya Inggris menentang peningkatan status Palestina seperti diharapkan Israel.

Diplomasi dengan negara-negara Uni Eropa ditempuh Israel dengan melobi Negara-negara penting, setelah Prancis dan Inggris yang juga menjadi anggota tetap DK PBB, Israel juga melakukan diplomasi kepada Jerman, Belanda, dan Belgia. Diplomasi kepada Jerman ini memang menghasilkan dukungan bagi Israel, dan telah ikut menggagalkan pengakuan bagi Palestina di tahun 2011. Keadaan berbalik dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 2012, yaitu Jerman memilih sikap abstain dengan tidak menggunakan hak suaranya untuk mendukung atau menolak peningkatan status Palestina.

Jerman sebagai mitra Israel ingin melihat negosiasi penuh, bukan langkah sepihak. Jerman dan Israel mendukung solusi dua negara tapi dicapai melalui negosiasi dan saling pengertian. Dalam diplomasinya dengan Jerman, menteri luar negeri Israel Avigdor Liberman dan menteri luar negeri Jerman Guido Westerwelle pada 5 Mei 2011 melakukan konferensi pers bersama, yang isinya menyatakan bahwa Jerman dan Israel menentang langkah unilateral.

Pertemuan pada 18 – 19 Januari 2012 terjadi antara PM Israel Netanyahu dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, dan menteri Uri Rosenthal (Luar Negeri) dan Maxime Verhagen (Perdagangan). Netanyahu juga diterima oleh Ratu Beatrix. Pembicaraan Netanyahu dengan para pemimpin Belanda menghasilkan penegasan dari Belanda bahwa Belanda tetap konsisten menentang upaya Palestina untuk diterima sebagai negara anggota dari PBB. Sikap ini bukan hanya sebagai negara Eropa, tetapi juga sebagai negara anggota di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Artinya, sebagai negara anggota Dewan HAM PBB, Belanda menentang upaya Palestina menjadi anggota PBB.<sup>17</sup> Diplomasi Netanyahu di Belanda dikatakan berhasil mendapatkan komitmen dari Belanda terkait

dengan upaya Palestina menjadi negara non anggota di PBB. Namun pada akhirnya, Belanda tidak memberikan dukungan kepada sikap Israel. Buktinya, dalam pemungutan suara terhadap peningkatan status Palestina di PBB pada November 2012, Belanda memilih abstain.

Diplomasi bilateral kepada Belgia ditunjukkan dengan pertemuan bersama Presiden Israel Shimon Peres dan PM Belgia Leterme pada 4 September 2011. Pada pertemuan tersebut, menghasilkan pernyataan bersama yang isinya menyayangkan jika ada deklarasi sepihak kenegaraan oleh Palestina di PBB yang dapat menyebabkan kebuntuan antara kedua belah pihak terutama ketika kesepakatan damai dapat dicapai melalui negosiasi langsung.

Pada tahun 2012, Belgia menerima proposal agar mendukung peningkatan status Palestina. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Didier Reynders menyatakan Kabinet telah menyetujui proposal untuk Belgia untuk mendukung rancangan resolusi untuk memberikan status negara pengamat non anggota kepada Palestina.

Dalam sebuah surat kepada Presiden Abbas pada tanggal 15 Oktober 2012, Menteri Reynders menyatakan niatnya untuk menaikkan status diplomatic delegasi Otoritas Palestina di Brussels.<sup>18</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa diplomasi bilateral Israel yang ditujukan kepada Belgia telah gagal mendapatkan dukungan.

Diplomasi langsung dengan Palestina juga dilakukan. Pada kesempatan lainnya, yaitu pada 18 Agustus 2012, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah menawarkan pembicaraan damai langsung dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di sela penyelenggaraan Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS.<sup>19</sup> Israel juga menekan Palestina yaitu dengan membekukan pendanaan (\$AS 120 juta) untuk PNA dan mengancam akan menggulingkan Mahmoud Abbas.

Penasehat Presiden Palestina, Nimir Hammad menolak mengaitkan tawaran pembebasan tahanan oleh Netanyahu dengan langkah Palestina di PBB.<sup>20</sup> Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menawarkan pembebasan tahanan politik kepada negosiator Palestina, Saeb Erekat pada tanggal 15 Juli 2012 di Yerusalem asalkan Otorita Palestina

membatalkan permohonannya pada PBB agar diakui sebagai negara, seperti negara anggota PBB lainnya.

### Diplomasi Multilateral Israel di PBB

PM Netanyahu, dalam sidang umum PBB, september 2011, mengingatkan bahwa Timur Tengah akan mencapai perdamaian melalui pemeliharaan keamanan. "Israel dan Palestina tidak dapat mencapai perdamaian melalui resolusi PBB, tetapi hanya melalui negosiasi langsung antara pihak-pihak. Masalahnya, Palestina telah menolak untuk bernegosiasi. Israel menginginkan perdamaian dengan negara Palestina, tapi negara Palestina ingin tanpa perdamaian".<sup>21</sup> Pernyataan ini menegaskan ajakan Israel kepada majelis umum untuk tidak perlu mengeluarkan resolusi terkait Palestina, termasuk peningkatan status Palestina di PBB. Pada sidang Majelis Umum PBB tahun 2011 memang tidak membawa hasil bagi Palestina.

Melalui pidatonya, Netanyahu berusaha menarik simpati seluruh peserta dengan menyatakan komitmen Israel untuk berdamai dengan semua Negara. Israel telah mengulurkan tangan dalam damai sejak didirikan 63 tahun yang lalu. Netanyahu mengklaim Israel bisa berdamai dengan Mesir dan Yordania, Turki, Tunisia, Lebanon dan Iran karena Israel menghargai negara lain. Netanyahu menyatakan kesiapannya untuk berdamai dengan Palestina.

Netanyahu mengungkapkan bahwa Palestina sangat berbahaya bagi keamanan internasional karena fasilitas internasional seperti bandara di Israel sangat dekat dengan Tepi Barat. Serangan Palestina dapat setiap saat mengenai pesawat terbang dari berbagai negara. Sifat dasar militan ingin mengubah kawasan Israel sekarang dari karakter Yahudi jelas tidak mungkin, namun itu yang sebenarnya diupayakan oleh Palestina. Dikatakan bahwa Palestina selalu berbicara tidak benar dengan mengatakan masalah konflik bersumber dari pemukiman, padahal konflik telah berlangsung sejak 1948, bukan hanya dari tahun 1967. Pemukiman Yahudi di Tepi Barat adalah hasil dari konflik sebelumnya. Atas dasar pemahaman tersebut, Netanyahu mengajak Abbas untuk menghentikan upayanya mengenalkan diri sebagai Negara Palestina dan meminta

peningkatan status menjadi anggota tetap PBB. Apabila benar-benar ingin berdamai, Palestina harus bersedia menempuh jalur negosiasi dengan Israel.

Netanyahu mengingatkan bahwa kehadiran Israel di kawasan yang disebut milik Palestina tersebut sebenarnya adalah kehendak sejarah di mana bangsa Yahudi telah kembali ke tanah kelahirannya sendiri setelah terusir selama 4000 tahun silam dan tersebar di berbagai penjuru dunia, bahkan sampai menjadi korban kekejaman Nazi di Jerman. Pernyataan Netanyahu tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya masalah pemukiman, tetapi juga keyakinan.

Netanyahu mengakui Yahudi dan Palestina sebagai satu keturunan yang sama yaitu keturunan dari Nabi Ibrahim. Netanyahu menyerukan pentingnya hidup berdampingan. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Israel bersedia mengakui Palestina merdeka dengan syarat melalui proses negosiasi damai dengan Israel. Namun pada saat yang sama, Israel tetap keberatan berbagi wilayah dengan Palestina dibuktikan dengan terus dibangunnya pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Israel tidak ingin kota-kota yang disebutkan dalam kitab sucinya seperti Yerusalem, Samara dan sebagainya menjadi bagian dari wilayah Palestina. Walaupun Israel selalu menyatakan damai, tetapi Israel tetap tidak mau melepaskan wilayah Palestina yang telah didudukinya sejak tahun 1967.

Sidang Majelis Umum PBB terdiri dari serangkaian agenda penting yang resmi dijadwalkan oleh PBB, setelah pembukaan sidang pada 18 September 2012, agenda berikut di antaranya adalah General Debate pada 25 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012.<sup>22</sup> Pada *General Debat* dalam sidang Majelis Umum PBB pada 30 Oktober 2012 tersebut, Netanyahu memojokkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebagai hanya bisa bicara tetapi tanpa bukti. Dikatakan bahwa bangsa Palestina sama dengan militan Islam yang lain yang biasa melakukan teror, karena itu, Netanyahu mengajak semua pihak untuk mengingatkan Palestina agar kembali berunding guna mengupayakan perdamaian.

Pada kesempatan bertemu dengan Dewan

Keamanan PBB pada 15 Oktober 2012, Ron Prosor duta besar Israel untuk PBB menyatakan bahwa deklarasi simbolik Palestina tidak akan mengubah apa-apa di lapangan. Peningkatan status Palestina hanya akan meningkatkan harapan yang tidak dapat dipenuhi. Upaya Palestina mendapat status baru adalah resep untuk ketidakstabilan dan berpotensi menimbulkan kekerasan. Palestina tidak memenuhi persyaratan yang paling dasar untuk disebut sebagai sebuah negara.

Pernyataan utusan Israel tersebut diperkuat oleh pernyataan dari utusan AS yaitu Susan Rice pada tanggal 15 Oktober 2012 di Dewan Keamanan PBB bahwa aksi sepihak, termasuk inisiatif untuk memberikan status negara non-anggota bagi Palestina di PBB, hanya akan membahayakan proses perdamaian dan menyulitkan upaya untuk mengembalikan para pihak untuk negosiasi langsung.

Diplomasi Israel di PBB tidak membawa hasil, kecuali rasa malu Israel. Negara-negara anggota PBB, Kamis 29 November 2012, menyetujui peningkatan status keanggotaan Palestina sebagai negara pengamat di PBB dengan 138 suara setuju dan sembilan menentang.

Sembilan negara yang menentang yaitu Kanada, Czech Republic, Israel, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Nauru, Panama, Palau, United States. Kegagalan Israel ini berdampak pada semakin tersudutnya Israel dalam hukum internasional. Menyusul peningkatan status keanggotaan tersebut, Palestina dapat mengadakan pelanggaran Israel dalam memperluas pembangunan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan dan masalah lain kepada lembaga-lembaga internasional.

### **Diplomasi dengan Uni Eropa**

Diplomasi melalui forum di luar PBB dilakukan dalam forum Uni Eropa. Selama kunjungan PM Israel ke negara-negara UE, Israel melobi negara-negara UE agar mendukung Israel dalam memberikan suara terhadap pengakuan negara Palestina di Majelis Umum PBB pada bulan September 2011. Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu juga bertemu pada hari Minggu dengan kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton dan Kepala Utusan Kuartet

Tony Blair.<sup>23 1</sup>

Diplomasi Israel dengan Uni Eropa tidak membawa hasil dukungan dalam sidang Umum PBB, bahkan perwakilan Uni Eropa untuk PBB, dalam pedatonya pada tanggal 29 November 2012 menyatakan perlunya penyelesaian konflik dengan meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat. Dalam pernyataannya dikatakan bahwa: Uni Eropa telah berulang kali menyatakan dukungannya dan berharap untuk Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari solusi untuk konflik.

### **Kesimpulan**

Pertama, Israel memanfaatkan diplomasi bilateral dengan negara-negara di dunia seperti negara-negara Eropa yaitu Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia dan negara-negara di kawasan lain termasuk Amerika Serikat dan sebagainya. Melalui diplomasi bilateral tersebut, Israel berusaha meyakinkan bahwa upaya Palestina hanya akan menjauhkan Palestina dan Israel dari proses damai. Israel selalu menegaskan bahwa upaya damai hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung dua pihak yaitu Palestina dan Israel, bukan ditentukan oleh pihak lain, termasuk PBB. Upaya diplomasi dengan pihak Palestina dilakukan Israel dengan cara menekan dan mengancam akan menahan pajak yang berasal dari masyarakat Palestina.

Kedua, Israel memanfaatkan diplomasi multilateral guna mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional melalui forum-forum dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 2011 dan tahun 2012. PM Israel Benjamin Netanyahu memanfaatkan forum Sidang Umum PBB untuk meyakinkan negara-negara anggota PBB bahwa Israel berkomitmen kuat untuk menciptakan kerjasama seperti telah dilakukan Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya seperti Mesir, Turki, Yordania dan Suriah melalui negosiasi dua belah pihak, bukan hasil dari keputusan PBB.

Pada sidang umum PBB, Israel dengan tegas mengajak semua negara untuk mendukung upaya negosiasi dua pihak yaitu Palestina dan Israel dengan cara menolak peningkatan status

Palestina di PBB. Masalahnya selama ini, Palestina menjauh dari proses damai dengan melakukan langkah-langkah sepihak seperti dengan mengenalkan dirinya sebagai sebuah negara. Karena itu, Israel mengajak agar anggota-anggota PBB menolak peningkatan status Palestina di PBB.

Diplomasi Multilateral juga dilakukan Israel dengan meyakinkan kepada Uni Eropa bahwa tindakan sepihak Palestina hanya akan menjauhkan Palestina dari keadaan damai yang diharapkan. Diplomasi multilateral dengan Uni Eropa ataupun dengan PBB tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan Israel dibuktikan dengan banyaknya negara-negara yang memilih untuk mendukung peningkatan status Palestina menjadi negara peninjau non anggota. Artinya, Palestinan di mata PBB bukan lagi sebuah entitas, tetapi adalah negara.

Terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil dari upaya Israel menentang peningkatan status Palestina di dalam PBB. *Pertama*, Israel di mata internasional sudah dipersepsikan negatif oleh negara-negara di dunia. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya Israel tidak cukup kuat secara politik, bahkan secara perlahan tapi pasti, status Palestinan terus meningkat dari hanya sebagai entitas menjadi sebuah negara meskipun belum negara merdeka. *Kedua*, diplomasi Palestina yang terus dilakukan dengan memanfaatkan forum-forum internasional guna membangun opini kuat terbukti efektif menyudutkan Israel.

(Endnotes)

#### CATATAN AKHIR

1 Indra Kesuma Nasution, "Rethinking Isratine", Jurnal Politeia, Vol. 2, No. 2 Tahun 2010, hal 120

2 Marty Natalegawa, "Jadi Anggota PBB Bukan Tujuan Akhir Palestina", dalam <http://www.rimanews.com/read/20110923>, diakses tanggal 12 Juni 2012

3 "AS akan memveto upaya Palestina di PBB," dalam <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011> diakses tanggal 23 Mei 2012

4 S.L. Roy, Diplomasi, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm 2

5 S.L. Roy, Diplomasi, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm 2

6 James Notter & Louise Diamond, Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy in Practice, Occasional Paper Number 7, October 1996, Institute for Multi-Track Diplomacy, Arlington VA 22209 USA

7 "Background Paper Related to Palestine Status Status of Palestine at the United Nations" dalam <http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/11550>, diakses tanggal 12 Desember 2012

8 "Mahmud Abbas (Akhirnya) Datangi KTT GNB," dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global>, diakses tanggal 3 Maret 2013

9 "Menluhadiri GNB di Palestina," <http://international.sindonews.com/read/2012/08/04/40/663080/menlu>, diakses tanggal 12 Januari 2013

10 "Lima Negara Anggota OKI Tolak Dukungan Palestina," dalam <http://jakarta.okezone.com/read/2012/12>, diakses tanggal 12 Februari 2013

11 "Palestina Masuk Unesco, AS Hentikan Bantuan", dalam <http://dunia.news.viva.co.id/news/read>, diakses tanggal 20 Desember 2012

12 "Prancis usulkan Palestina jadi Negara pengamat di PBB", [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110922\\_francepalestine.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110922_francepalestine.shtml), diakses tanggal 12 Desember 2012

13 "PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967", dalam [dunia.news.viva.co.id/](http://dunia.news.viva.co.id/), diakses tanggal 12 Maret 2013

14 "Ketakutan Palestina Merdeka, Israel Lancarkan Perang Diplomasi", dalam [www.voiceofpalestina.net](http://www.voiceofpalestina.net) diakses tanggal 13 Maret 2013

15 "Amerika Ancam Hentikan Bantuan Dana ke Palestina", dalam [www.tempo.co/read/news/2011](http://www.tempo.co/read/news/2011), diakses tanggal 6 Maret 2013

16 "Israeli relations with France 'excellent' despite UN vote", dalam <http://www.france24.com/en/2012113>, diakses tanggal 22 Januari 2013

17 "[Netanyahu visits Holland: agreement about regular common meetings of the Dutch and Israeli](http://www.netanyahuvisits.com)



[cabinets](http://www.nl-aid.org/continent/netherlands)” dalam <http://www.nl-aid.org/continent/netherlands>, diakses tanggal 4 Maret 2013

18 “Palestine and the UN: Belgium backs the European majority and pushes for a return to negotiations without pre-conditions,” dalam [http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press\\_releases](http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases), diakses tanggal 4 Maret 2013

19 “Netanyahu tawarkan pembicaraan kepada Abbas,” <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia>, diakses tanggal 12 Januari 2013

20 “Cegah Langkah Palestina di PBB, PM Israel Tawarkan Pembebasan Tahanan”, dalam [knp.or.id/article](http://knp.or.id/article), diakses tanggal 13 Februari 2013

21 “Remarks by PM Benjamin Netanyahu to the U.N. General Assembl” dalam <http://www.mfa.gov.il/MFA>, diakses tanggal 10 Januari 2013

22 “U.N. General Assembly 2012: Speeches,” dalam [www.un.org](http://www.un.org), diakses tanggal 15 Februari 2013

23 “Netanyahu: EU ministers must demand from the Palestinians what they demand from Israel”, dalam <http://www.bicom.org.uk/quote/11714>, diakses tanggal 12 Januari 2013

#### DAFTAR PUSTAKA

Indra Kesuma Nasution, “Rethinking Isratine”, Jurnal Politeia, Vol. 2, No. 2 Tahun 2010, hal 120

Marty Natalegawa, “Jadi Anggota PBB Bukan Tujuan Akhir Palestina”, dalam <http://www.rimanews.com/read/20110923>, diakses tanggal 12 Juni 2012

“AS akan memveto upaya Palestina di PBB,” dalam <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011> diakses tanggal 23 Mei 2012

Roy, S.L, Diplomasi, Jakarta: Rajawali Press, 1991

James Notter & Louise Diamond, Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy in Practice, Occasional Paper Number 7, October 1996, Institute for Multi-Track Diplomacy, Arlington VA 22209 USA

“Background Paper Related to Palestine Status

Status of Palestine at the United Nations” dalam <http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/11550>, diakses tanggal 12 Desember 2012

“Mahmud Abbas (Akhirnya) Datangi KTT GNB,” dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global>, diakses tanggal 3 Maret 2013

“Menluhadiri GNB di Palestina,” <http://international.sindonews.com/read/2012/08/04/40/663080/menlu>, diakses tanggal 12 Januari 2013

“Lima Negara Anggota OKI Tolak Dukung Palestina,” dalam <http://jakarta.okezone.com/read/2012/12>, diakses tanggal 12 Februari 2013

“Palestina Masuk Unesco, AS Hentikan Bantuan”, dalam <http://dunia.news.viva.co.id/news/read>, diakses tanggal 20 Desember 2012

“Prancis usulkan Palestina jadi Negara pengamat di PBB”, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110922-francepalestine.shtml>, diakses tanggal 12 Desember 2012

PM Israel Tolak Kembali ke Peta 1967”, dalam [dunia.news.viva.co.id/](http://dunia.news.viva.co.id/), diakses tanggal 12 Maret 2013

“Ketakutan Palestina Merdeka, Israel Lancarkan Perang Diplomasi”, dalam [www.voiceofpalestina.net](http://www.voiceofpalestina.net) diakses tanggal 13 Maret 2013

“Amerika Ancam Hentikan Bantuan Dana ke Palestina”, dalam [www.tempo.co/read/news/2011](http://www.tempo.co/read/news/2011), diakses tanggal 6 Maret 2013

“Israeli relations with France ‘excellent’ despite UN vote”, dalam <http://www.france24.com/en/2012113>, diakses tanggal 22 Januari 2013

“Netanyahu visits Holland: agreement about regular common meetings of the Dutch and Israeli cabinets” dalam <http://www.nl-aid.org/continent/netherlands>, diakses tanggal 4 Maret 2013

“Palestine and the UN: Belgium backs the European majority and pushes for a return to negotiations without pre-conditions,” dalam [http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press\\_releases](http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases), diakses

tanggal 4 Maret 2013

“Netanyahu tawarkan pembicaraan kepada Abbas,” <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia>, diakses tanggal 12 Januari 2013

“[Cegah Langkah Palestina di PBB, PM Israel Tawarkan Pembebasan Tahanan](#)”, dalam [knp.or.id/article](http://knp.or.id/article), diakses tanggal 13 Februari 2013

“Remarks by PM Benjamin Netanyahu to the U.N. General Assembl” dalam <http://www.mfa.gov.il/MFA>, diakses tanggal 10 Januari 2013

“U.N. General Assembly 2012: Speeches,” dalam [www.un.org](http://www.un.org), diakses tanggal 15 Februari 2013

“Netanyahu: EU ministers must demand from the Palestinians what they demand from Israel”, dalam <http://www.bicom.org.uk/quote/11714>, diakses tanggal 12 Januari 2013